



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG  
TAHUN 2019**

**DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG  
KOTA YOGYAKARTA**

Jl. Kenari No.56 Yogyakarta 55165 Telepon 515865, 515866, 562682  
Email :[pertanahantataruag@jogjakota.go.id](mailto:pertanahantataruag@jogjakota.go.id)

## Kata Pengantar

Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2019 merupakan rencana kerja tahun ketiga dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017-2022, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022,

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dimulai penyusunannya dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) bertingkat mulai dari kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kota. Perumusan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2019 mengakomodir program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi dengan pembangunan nasional dan Pemerintah DIY, koridor pembangunan tahun 2019 diarahkan pada tema: : **“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Rangka Mendorong Pemerataan Pembangunan”**, maka Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta akan melaksanakan kegiatan dan mengampu pekerjaan dari sebagian kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Renja Dinas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2019 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, dan sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 serta merupakan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Renja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Yogyakarta,

2018

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	1
Kata Pengantar .....	2
Daftar Isi .....	3
BAB I PENDAHULUAN .....	4
1.1 Latar Belakang .....	4
1.2 Landasan Hukum .....	5
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU ..	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	13
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	15
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	16
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	24
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	25
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	25
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	25
3.3 Program dan Kegiatan .....	25
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	27
BAB V PENUTUP .....	39

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta berkewajiban menyusun Renja SKPD untuk tahun 2019.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Renstra SKPD sesuai arahan operasional dalam RKPD.
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA tahun berikutnya.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun Renja SKPD, guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, difokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta melanjutkan visi pembangunan Kota Yogyakarta yang mendasarkan pada pasal 4 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029 bahwa Pembangunan Kota diarahkan dengan visi, yaitu menjadikan "Kota Yogyakarta Sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan".

Perumusan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2019 mengakomodir program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi dengan pembangunan nasional dan Pemerintah DIY, koridor pembangunan tahun 2019 diarahkan pada tema: : **“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Rangka Mendorong Pemerataan Pembangunan”**, maka Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta akan melaksanakan kegiatan dan mengampu pekerjaan dari sebagian kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Prioritas tersebut diterjemahkan ke dalam **sasaran pembangunan di Kota Yogyakarta**, sebagai berikut :

1. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat;
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat;
3. Harapan hidup masyarakat meningkat;
4. Melek huruf masyarakat meningkat;
5. Aksesibilitas pendidikan meningkat;
6. Daya saing pendidikan meningkat;
7. Kualitas lingkungan hidup meningkat;
8. Pendapatan masyarakat meningkat;
9. Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun;
10. Kemiskinan masyarakat menurun;
11. Ketimpangan antar wilayah menurun;
12. Kunjungan wisatawan meningkat;
13. Lama tinggal wisatawan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi landasan hukum Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dalam menyusun Rencana Kerja 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 Urusan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016;
19. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud dari penyusunan RenjaDinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta tahun 2019 ini adalah sebagai panduan dalam perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta tahun 2019.

#### **1.3.2 Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya Renja SKPD ini adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada dalam Renja ke dalam KUA dan PPAS Tahun 2019.

### **1.4 Sistematika**

Sistematika RenjaDinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2017, sebagaimana dimaksud terdiri dari :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2017 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah. (Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan terlampir dalam Tabel 2.1)

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018**  
**Kota Yogyakarta**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017(TW IV)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	100%	100,00%			100,00%	#REF!
1.1	Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan Minum Pegawai			50 orang	50 orang				
		Makan Minum Koordinasi			89 kali	89 kali				
		Makan Minum Tamu			100 orang	100 orang				
		Operasional/Survey/ Monitoring			20 kali	20 kali				
		Laporan hasil Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah			22 laporan	22 laporan				
1.2	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor	Meterai 3000 yang tersedia			300 buah	300 buah				
		Meterai 6000 yang tersedia			300 buah	300 buah				
		Jasa Pengiriman/Paket			17 kali	17 kali				
		STNK Roda 2 yang terbayar			15 unit	15 unit				
		STNK Roda 4 yang terbayar			5 unit	5 unit				

		Belanja STNK Roda 2 yang hilang			1 unit	1 unit				
		KIR Kendaraan Roda 4			1 unit	1 unit				
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia			12 jenis	12 jenis				
		Jasa kebersihan kantor			12 bulan	12 bulan				
		Alat tulis kantor yang tersedia			71 jenis	71 jenis				
		Jasa Penggandaan			170000 lembar	170000 lembar				
		Komponen Instalasi Listrik/penerangan			7 jenis	7 jenis				
		Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia			3 jenis	3 jenis				
		Peraturan Perundang-undangan yang tersedia			4 jenis	4 jenis				
		Jasa perbaikan peralatan kerja			14 jenis	14 jenis				
		Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia			4 jenis	4 jenis				
		Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			10 jenis	10 jenis				
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran.	Dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun.			4 jenis	4 jenis				
		Dokumen Administrasi kepegawaian yang dikelola			41 Dok ASN	41 Dok ASN				
		Jasa Tenaga Bantu			3 orang	3 orang				
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>				

2.1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa Pemeliharaan Gedung/ Bangunan kantor/tempat			2 Jenis	2 Jenis				
2.2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Roda 4			5 Unit	5 Unit				
		Jasa Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Roda 2			15 Unit	15 Unit				
3.	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.</b>	<b>Persentase peningkatan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>				
3.1	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD.	Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA dan DPA).			5 dokumen	5 dokumen				
		Laporan Kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil).			5 dokumen	5 dokumen				
4.	<b>Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang</b>	<b>Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang</b>	<b>61,40%</b>							
4.1	Kegiatan Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci	Kajian Evaluasi RTRW			1 Dokumen	1 Dokumen				
		Draft Raperwal Juknis Perda RDTR			1 Dokumen	1 Dokumen				
4.2	Kegiatan Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan	Rencana Tata Bangunan dan Tata Lingkungan (RTBL) Jl. Solo			1 Dokumen	1 Dokumen				
		Kajian Blok Kawasan Strategis			1 Dokumen	1 Dokumen				
		Review Rencana Tata			1 Dokumen	1 Dokumen				

		Bangunan dan Tata Lingkungan (RTBL) Kawasan Kotabaru.								
4.3	Kegiatan Pembinaan Tata Ruang	Laporan Telaah Penataan Ruang Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen				
		Sosialisasi Pembinaan Tata Ruang Kota Yogyakarta			14 Kecamatan	14 Kecamatan				
5.	<b>Program Pengendalian Tata Ruang</b>	<b>Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang</b>	<b>50,25%</b>							
5.1	Kegiatan Pengendalian Tata Ruang	Kajian Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan			1 Dokumen	1 Dokumen				
		Laporan Pemberian Rekomendasi IP2T			1 Dokumen	1 Dokumen				
5.2	Kegiatan Pengawasan Tata Ruang	Laporan Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Pengawasan Tata Ruang (Turbinlakwas)			1 Dokumen	1 Dokumen				
		Neraca Penatagunaan Tanah, Sumber Daya Air, Udara dan Sumber Daya Alam lainnya.			1 Dokumen	1 Dokumen				
5.3	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang	Peta Updating RTRW			1 Dokumen	1 Dokumen				
		Laporan Penerapan Norma Standar Prosedur dan Krteria (NSPK)			1 Dokumen	1 Dokumen				
		Laporan Standar Pelayanan Minimal			2 Dokumen	2 Dokumen				
6.	<b>Program Pengelolaan Pertanahan</b>	<b>Persentase pensertifikatan tanah aset pemkot.</b>	<b>91,80%</b>							
		<b>Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan</b>	<b>93,60%</b>							

		<b>pertanahan.</b>								
6.1	Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan	Pensertifikatan aset tanah Pemerintah Kota Yogyakarta.			10 bidang	10 bidang				
		Penyelesaian Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara.			60 permohonan	60 permohonan				
		Pengurusan Surat kekancingan Aset Pemkot Yogyakarta ke KHP Wahono Sarto Kriyo			15 dokumen	15 dokumen				
		Pengurusan Perubahan Peta Bidang untuk Fasum			10 bidang	10 bidang				
6.2	Kegiatan Pemanfaatan Pertanahan	Pengadaan Tanah pembangunan Kantor Kelurahan			5 Kelurahan	5 Kelurahan				
		pengadaan tanah untuk RTHP			3 lokasi	3 lokasi				
		Pengadaan tanah untuk Balai Serbaguna dan jalan			4 lokasi	4 lokasi				
6.3	Kegiatan Penyelesaian Masalah Pertanahan	Penyelesaian Masalah Pertanahan			1 Dokumen	1 Dokumen				
		Pencegahan timbulnya masalah pertanahan.			14 Kecamatan	14 Kecamatan				

### **Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Analisis Kinerja Pelayanan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta mulai tahun 2017 didasarkan pada Renstra 2017-2022 dimana indikator program dan target renstra SKPD telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta adalah sesuai tabel berikut.

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta**  
**Kota Yogyakarta**

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>I</b>	<b>Indikator Sasaran :</b>														
1	Indeks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan tata ruang.			47,90	55,83	64,25	70,58	77,25	81,97	47,90					
2	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan			30,07	92,41	94,95	96,86	98,77	100	30,07					
<b>II</b>	<b>Indikator Program :</b>														
1	Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang			52,30%	61,40%	72,00%	79,40 %	86,50%	88,48%	52,30%					
2	Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang			43,50%	50,25%	56,50%	61,75 %	68,00%	75,45%	43,50%					
3	Persentase pensertifikatan tanah aset pemkot.			29,40%	91,80%	94,82%	96,89%	98,96%	100%	29,40%					
4	Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan pertanahan.			31,38%	93,60%	95,20%	96,80%	98,40%	100%	31,38%					

## 2.2 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Kurang optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang kemungkinan disebabkan karena selama ini belum tersedianya kelembagaan formal yang khusus menangani tata ruang sehingga masih ada tumpang tindih kewenangan antar instansi, atau sebaliknya ada sektor yang justru dibiarkan atau tidak tersentuh sama sekali karena ketidakjelasan instansi mana yang diharapkan bertanggungjawab. Instansi yang secara khusus bertanggungjawab menangani tata ruang belum ada, sementara saat ini dengan perkembangan kota yang cukup cepat banyak terjadi alih fungsi lahan. Hal ini jika tidak diantisipasi saat ini akan menimbulkan permasalahan perkotaan di masa datang, perkembangan kota akan menjadi tidak tertata dan tidak terkendali, tidak nyaman untuk berkehidupan. Sementara sebagai sebuah kota diharapkan (1) kelestarian lingkungan kota yang berkelanjutan dapat terjaga, (2) sarana prasarana perkotaan memadai, (3) kelancaran perhubungan dan lalu lintas, serta (4) standar kualitas lingkungan perumahan dan perkotaan meningkat. Selain itu (5) **pengendalian pemanfaatan ruang** yang kurang optimal diindikasikan dari (6) rendah (kurang) atau tidak adanya fungsi lindung kawasan sempadan sungai, (7) kecenderungan perubahan peruntukan ruang publik menjadi ruang privat dan rendah atau kurangnya fungsi lindung kawasan sempadan sungai.

Disisi lain permasalahan dan Isu Strategis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, meliputi :

- a. kelestarian lingkungan kota yang berkelanjutan kurang dapat terjaga,
- b. sarana prasarana perkotaan kurang memadai,
- c. kelancaran perhubungan dan lalu lintas,
- d. standar kualitas lingkungan perumahan dan perkotaan meningkat
- e. rendah (kurang) atau tidak adanya fungsi lindung kawasan sempadan sungai,
- f. kecenderungan perubahan peruntukan ruang publik menjadi ruang privat

Fungsi Penataan Ruang berdasarkan PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi :

### 1. Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

- a. Rencana penyediaan dan pemanfaatan wilayah kota terbuka hijau publik dalam rencana tata ruang wilayah kota paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota.
- b. Rencana penyediaan dan pemanfaatan wilayah kota terbuka hijau privat dalam rencana tata ruang wilayah kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas wilayah kota.
- c. Apabila luas ruang terbuka hijau, memiliki total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

### 2. Pengaturan penataan ruang diselenggarakan untuk:

- a. mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- b. memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan
- c. mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh aspek penyelenggaraan penataan ruang.

3. **Pembinaan penataan ruang diselenggarakan untuk:**
  - a. meningkatkan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan penataan ruang;
  - b. meningkatkan kapasitas dan kemandirian pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang;
  - c. meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan
  - d. meningkatkan kualitas struktur ruang dan pola ruang.
  
4. **Pelaksanaan pemanfaatan ruang diselenggarakan untuk:**
  - a. mewujudkan struktur ruang dan pola ruang yang direncanakan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat secara berkualitas; dan
  - b. mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan dilaksanakan secara terpadu.
  
5. **Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan untuk :**
  - a. menjamin terwujudnya tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang.
  - b. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui:
    - 1) pengaturan zonasi;
    - 2) perizinan;
    - 3) pemberian insentif dan disinsentif; dan
    - 4) penerapan sanksi.
  
6. **Pengawasan penataan ruang diselenggarakan untuk:**
  - a. menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang;
  - b. menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang penataan ruang; dan
  - c. meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang.

Melalui program dan kegiatan yang disusun Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dengan partisipasi dari berbagai pihak pada tahun yang akan datang diharapkan dapat memperbaiki kondisi daerah yang ada. Kondisi umum daerah secara makro yang diinginkan atau diproyeksikan ke depan pada akhir Pembangunan Jangka Menengah yaitu pada tahun 2022, adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat.	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang.	81,97
2.	Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat.	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan.	100

### 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Melalui program dan kegiatan yang disusun Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dengan partisipasi berbagai pihak, pada tahun yang akan datang diharapkan dapat memperbaiki kondisi tata ruang yang diinginkan sebagai Sasaran Pembangunan Daerah:

N	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Target
---	----------------------------	-------------------	--------

0			
1	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat.	Persentasekesesuaian pemanfaatan ruang.	73,40%

Proses pelaksanaan peningkatan sarana prasarana pada akhir Renstra diharapkan dapat memperbaiki kondisi tata ruang secara optimal, termasuk penyusunan hubungan input, proses dengan output/outcomes.

Perbandingan antara RKPD 2018 dengan rancangan awal usulan RKPD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dapat disajikan sebagaimana **Tabel 2.3** berikut:

**Tabel 2.3**  
**Review terhadap Rancangan Awal Tahun 2019**  
**Kota Yogyakarta**

**SKPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta**

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>		<i>Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran</i>	100%	716.965.330	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>		<i>Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran</i>	100%	716.965.330	
1.1	<i>Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi.</i>	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	<i>Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran</i>	100%	208.048.000	<i>Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi</i>	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	<i>Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran</i>	100%	208.048.000	
1.2	<i>Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor</i>	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	<i>Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran</i>	100%	428.235.070	<i>Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor</i>	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	<i>Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran</i>	100%	428.235.070	
1.3	<i>Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran</i>	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	<i>Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran</i>	100%	80.682.260	<i>Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran</i>	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	<i>Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran</i>	100%	80.682.260	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	<b>Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>100%</b>	355.188.000	<b>Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>100%</b>	355.188.000	
2.1	<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</i>	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	<i>Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD</i>	100%	229.488.000	<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor</i>	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	<i>Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD</i>	100%	229.488.000	
2.2	<i>Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</i>	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	<i>Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD</i>	100%	125.700.000	<i>Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</i>	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	<i>Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD</i>	100%	125.700.000	
3	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>Tpersentase peningkatan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>100%</b>	72.046.800	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>Persentase peningkatan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>100%</b>	72.046.800	
3.1	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian,</i>	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	<i>Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat</i>	100%	72.046.800	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan</i>	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	<i>Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat</i>	100%	72.046.800	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dan Laporan Capaian Kinerja SKPD		waktu			Laporan Capaian Kinerja SKPD		waktu			
			Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD	B				Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD	B		
4	<b>Program Pengelolaan Pertanahan</b>		<b>Persentasepensertifikata n tanah aset pemkot</b>	<b>94,82%</b>	<b>18.029.493.400</b>	<b>Program Pengelolaan Pertanahan</b>		<b>Persentasepensertifikata n tanah aset pemkot</b>	<b>44,00%</b>	<b>18.029.493.400</b>	
			<b>Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan pertanahan.</b>	<b>95,20%</b>				<b>Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan pertanahan.</b>	<b>32,47%</b>		
4. 1	Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan	Dinas Pertanaha n dan Tata Ruang	Persentase aset Pemerintah Kota Yogyakarta yang sudah disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta.	70%	173.986.800	Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan	Dinas Pertanaha n dan Tata Ruang	Persentase aset Pemerintah Kota Yogyakarta yang sudah disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta.	70%	173.986.800	
			Persentase pengurusan peta bidang tanah untuk fasum jalan kampung di wilayah Kota Yk.	30%				Persentase pengurusan peta bidang tanah untuk fasum jalan kampung di wilayah Kota Yk.	100%		
			Persentase perpanjangan/ permohonan baru Pemkot Yk untuk Pinjanm pakai tanah milik Sri Sultan HB Kraton Ngayogyakarta hadiningrat.	30%				Persentase perpanjangan/ permohonan baru Pemkot Yk untuk Pinjanm pakai tanah milik Sri Sultan HB Kraton Ngayogyakarta hadiningrat.	100%		

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Pelacakan dan identifikasi tanah se Kota Yk yang belum jelas haknya baik tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah Pemkot Yk.</i>	20%				<i>Pelacakan dan identifikasi tanah se Kota Yk yang belum jelas haknya baik tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah Pemkot Yk.</i>	100%		
4. 2	<i>Pemanfaatan Pertanahan</i>	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	<i>Bertambahnya aset/fasilitas publik milik pemkot Yogyakarta</i>	11 lokasi	17.821.806.600	Pemanfaatan Pertanahan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	<i>Bertambahnya aset/fasilitas publik milik pemkot Yogyakarta</i>	8 lokasi	17.821.806.600	
			<i>Persentase permohonan rekomendasi yang dapat diselesaikan</i>	100%				<i>Persentase permohonan rekomendasi yang dapat diselesaikan</i>	100%		
4. 3	<i>Penyelesaian Masalah Pertanahan</i>	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	<i>Kejelasan status pertanahan</i>	1 dokumen	33.700.000	Penyelesaian Masalah Pertanahan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	<i>Kejelasan status pertanahan</i>	1 dokumen	33.700.000	
5	<b>Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang.</b>		<b>Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang.</b>	72,00 %	1.924.160.490	<b>Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang.</b>		<b>Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang.</b>	72,00 %	1.924.160.490	
5. 1	<i>Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci</i>	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	<i>Tersedianya Draft Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta.</i>	1 dokumen	944.748.830	Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	<i>Tersedianya Draft Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta.</i>	1 dokumen	944.748.830	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Meningkatnya pengaturan tata bangunan dan tata lingkungan perkotaan.	2 dokumen	701.073.830	Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Meningkatnya Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan Perkotaan.	2 dokumen	701.073.830	
5.3	Pembinaan Tata Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Meningkatnya pemahaman dan akses informasi penataan ruang Kota Yogyakarta.	14 kecamatan	278.337.830	Pembinaan Tata Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Meningkatnya pemahaman dan akses informasi penataan ruang Kota Yogyakarta.	14 kecamatan	278.337.830	
6	<b>Program Pengendalian Tata Ruang</b>		<b>Persentase Penilaian Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pengawasan Tata Ruang.</b>	<b>56,50%</b>	1.006.296.940	<b>Program Pengendalian Tata Ruang</b>		<b>Persentase Penilaian Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pengawasan Tata Ruang.</b>	<b>56,50%</b>	1.006.296.940	
6.1	Pengendalian Tata Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Tersedianya data rinci pemanfaatan ruang kota Yogyakarta dan kesesuaian terhadap perencanaan tata ruang daerah	2 dokumen	221.241.140	Pengendalian Tata Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Tersedianya data rinci pemanfaatan ruang kota Yogyakarta dan kesesuaian terhadap perencanaan tata ruang daerah	2 dokumen	221.241.140	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6. 2	Pengawasan Tata Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Meningkatnya kesesuaian penyelenggaraan Penataan Ruang yang tertib dan berkelanjutan.	5 dokumen	304.422.400	Pengawasan Tata Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Meningkatnya kesesuaian penyelenggaraan Penataan Ruang yang tertib dan berkelanjutan.	5 dokumen	304.422.400	
6. 3	Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	<i>Terpenuhinya kebutuhan informasi tata ruang.</i>	3 dokumen	480.633.400	Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	<i>Terpenuhinya kebutuhan informasi tata ruang.</i>	2 dokumen	480.633.400	
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>				<b>22.104.150.960,-</b>	<b>TOTAL ANGGARAN</b>				<b>22.104.150.960,-</b>	

## 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**Tabel 2.4**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2019**  
**Pemerintah Kota Yogyakarta**

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pengelolaan Pertanahan/ Pemanfaatan Pertanahan	Kel. Suryatmajan	Pengadaan tanah pembangunan kantor	1 bidang	Fasilitas Pendidikan TK PKK.
		Kel. Pakuncen	Pengadaan tanah sarana umum taman. (RTHP)	1 bidang	
		Kel. Pandeyan	Pengadaan tanah sarana umum taman. (RTHP)	1 bidang	
		Kel. Warungbo to	Pengadaan tanah sarana umum taman. (RTHP)	3 bidang	
		Kel. Sorosutan	Pengadaan tanah sarana umum taman. (RTHP)	1 bidang	
		Kel. Purbayan	Pengadaan tanah sarana umum taman. (RTHP)	1 bidang	
		Kel. Ngampilan	Pengadaan tanah sarana umum taman. (RTHP)	1 bidang	
		Kel. Wirogunan	Pengadaan tanah sarana umum taman. (RTHP)	1 bidang	
		Kel. Gedongkiwo	Pegadaan Tanah Lain	1 bidang	Gedung Serbaguna
		Kel. Patangpulu han	Pengadaan Tanah Lain	1 bidang	Gedung Serbaguna
		Kel. Gowongan	Pengadaan Tanah Lain	1 bidang	Gedung Serbaguna

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta pada tahun 2019 telah melaksanakan penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang secara langsung menjadi Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, tetapi selaku SKPD yang memberikan pelayanan kepada SKPD hanya menampung hasil Musrenbang Kecamatan.

### BAB III

## TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Beberapa kebijakan nasional dalam pengimplementasiannya di daerah tidak hanya terkait dukungan dan ketepatan terhadap prioritas sasaran, namun termasuk sumber daya, tenaga, sarana prasarana yang mencukupi. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, sesuai Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwal) yang mengaturnya, berkewajiban dan masuk dalam mata rantai agar kebijakan nasional dan kebijakan regional Daerah Istimewa Yogyakarta dapat tercapai dengan baik.

Urusan Tata Ruang diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 yang merupakan amanah otonomi daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang. Di lain pihak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan memberikan amanah dalam dua bidang yang diampu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta yaitu Pertanahan dan Penataan Ruang. Hal ini membutuhkan pemenuhan sarana prasarana kerja dalam produktifitas kerja, sumber daya aparat pemerintahan sangatlah penting pengaruh dan perannya dalam pencapaiannya.

Pada akhirnya kebijakan nasional dapat tercapai apabila didukung oleh kebijakan dan pelaksanaan pada tingkat regional dan lokal yang baik, terstruktur dan sistematis.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

#### 3.2.1 Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta adalah :

1. Meningkatkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
2. Meningkatkan Tertib administrasi pertanahan.

#### 3.2.2 Sasaran

Sedangkan sasaran yang hendak diwujudkan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta adalah :

1. Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat.
2. Tertib administrasi pertanahan meningkat

### 3.3 Program dan Kegiatan

#### 3.3.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta yaitu:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat.	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang.	64,25

2.	Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat.	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan.	94,95
----	--	--	-------

### 3.3.2 Rencana Kinerja Tahunan 2019

Untuk mendukung prioritas pembangunan daerah khususnya prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola disusun Rencana Kinerja Tahunan 2019 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat.	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang.	64,25
2.	Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat.	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan.	94,95

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019 untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta merencanakan program dan kegiatan tahun 2018. Program kegiatan dimaksud terdiri dari 3 program.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 serta Prakiraan Maju Tahun 2020 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta adalah sesuai tabel berikut :

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Tabel 3.1  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

SKPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta

No	Urusan/ Bidang urusan Pemerintah n Daerah dan Program/Keg iatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penangg ung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Persentase kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%					716.965.330	788.661.863		
1.1	Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang			Makan dan minum yang tersedia untuk	-	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	208.048.000	228.852.800		
							a.koordinasi,	132 kali						
							b.pegawai	47 orang						

No	Urusan/ Bidang urusan Pemerintah n Daerah dan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggu ng Jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur					Target
							c.Tamu	225 orang						
							Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	19 laporan						
1.2	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang			Materai 6000 yang tersedia	300 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	428.235.070	471.058.577		
						Materai 3000 yang tersedia	400 buah							
						Buku Giro	3 buku							
						STNK roda 4 yang terbayar	5 unit							
						STNK roda 2 yang terbayar	15 unit							
						KIR Kendaraan Bermotor	1 unit							
						Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia	12 jenis							
						Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan							
						Alat Tulis Kantor yang tersedia	69 jenis							
						Jasa Percetakan	15 jenis							

No	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
							Jasa Penggandaan	110.000 lembar						
							Jasa Telepon	12 bulan						
							Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	8 jenis						
							Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 jenis						
							Bahan bacaan/Peraturan Perundangan yang tersedia.	10 buah						
							Bahan Komputer/ Printer.	5 jenis						
							Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	10 jenis						
							Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	4 jenis						
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola			Dinas Pertanahan dan Tata			Dokumen administrasi penatausahaan	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran	100%	80.682.260	88.750.486		

No	Urusan/ Bidang urusan Pemerintah n Daerah dan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penang g Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
	Pelayanan Perkantoran			Ruang			keuangan: SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi yang tersusun		administrasi, keuangan dan operasional perkantoran					
							Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	38 dokumen ASN						
							Jasa Pengelola Arsip	1 orang						
							Jasa Tenaga Naban	3 orang						
2	<b>Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Kinerja Aparatur dan Birokrasi</b>	<b>Akuntabilit as kinerja pemerintah daerah meningkat</b>		<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>100%</b>					<b>355.188.000</b>	<b>390.706.800</b>		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bang unan Kantor			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang			Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	1 Jenis	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	229.488.000	252.436.800		
2.2	Penyediaan dan			Dinas Pertanahan			Jasa pemeliharaan rutin/berkala	-	Dukungan terhadap	100%	125.700.000	138.270.000		

No	Urusan/ Bidang urusan Pemerintah n Daerah dan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penang- gung Jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur					Target
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operas ional			dan Tata Ruang			kendaraan dinas/operasional		peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD					
							a.roda 4 (empat),	5 unit						
							b.roda 2 (dua)	15 unit						
3	Program Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilit as kinerja pemerintah daerah meningkat		Persentase peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%					72.046.800	79.251.480		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian , dan Laporan Capaian Kinerja SKPD			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang			Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu	100%	72.046.800	79.251.480		
							Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD	B				

No	Urusan/ Bidang urusan Pemerintah n Daerah dan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penang g Jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur					Target
4	Program Pengelolaan Pertanahan	Lingkungan Hidup dan Pemanfaat an Ruang.	Tertib administras i pertanahan .		Prosentase tertib administrasi pertanahan.	94,82 %					18.029.493.400	19.832.442.740		
4.1	Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan			Kota Yogyakarta			Terdaftarnya Pensertifikatan aset tanah Pemerintah Kota Yogyakarta	20 bidang tanah	Persentase aset Pemerintah Kota Yogyakarta yang sudah disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta.	70%	173.986.800	191.385.480		
							Terdaftarnya permohonan pembuatan/perub ahan peta bidang untuk Fasum.	7 bidang	Prosentase pengurusan peta bidang tanah untuk Fasum jalan kampong di wilayah Kota Yk.	30%				
							Pengurusan permohonan baru/ perpanjangan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milik Sri Sultan HB Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.	10 bidang	Persentase perpanjangan/ permohonan baru Pemerintah Kota Yk untuk Pinjam Pakai Tanah Milik Sri Sultan HB Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.	30%				
							Pelacakan dan	1	Pelacakan dan	20%				

No	Urusan/ Bidang urusan Pemerintah n Daerah dan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penangg ung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
							identifikasi tanah se Kota Yk yang belum jelas haknya baik tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Pemkot Yk.	dokumen	identifikasi tanah se Kota Yk yang belum jelas haknya baik tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Pemkot Yk					
4.3	Penyelesaian Masalah Pertanahan			Kota Yogyakarta			Penyelesaian masalah pertanahan	1 dokumen	Kejelasan status pertanahan	1 dokumen	33.700.000	37.070.000		
					<b>Prosentase Pemenuhan kebutuhan tanah untuk kepentingan umum</b>	<b>95,20 %</b>								
4.2	Pemanfaatan Pertanahan			Kota Yogyakarta			Pengadaan tanah pembangunan kantor.	1 lokasi	Bertambahnya aset/fasilitas publik milik pemkot Yogyakarta	11 lokasi	17.821.806.600	19.603.987.260		
							Pengadaan tanah untuk RTHP	7 lokasi						
							Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum.	3 lokasi						
							Penyelesaian permohonan	1 dokumen	Persentase permohonan	100%				

No	Urusan/ Bidang urusan Pemerintah n Daerah dan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggu ng Jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur					Target
							rekomendasi pemanfaatan tanah negara.		rekomendasi yang dapat diselesaikan					
5	Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang.	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang.	Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkatkan.		Persentase Penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang.	72,00 %					1.924.160.490	2.116.576.539		
5.1	Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci			Kota Yogyakarta			Penyempurnaan Rancangan Perda RTRW	1 dokumen	Tersedianya Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta.	1 dokumen	944.748.830	1.039.223.713		
							Analisis Amdal Kawasan.	1 dokumen						
5.2	Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan			Kota Yogyakarta			Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	2 dokumen	Meningkatnya Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan Perkotaan.	2 dokumen	701.073.830	771.181.213		
							Draft Perwal RTBL	2 dokumen						
5.3	Pembinaan Tata Ruang			Kota Yogyakarta			Laporan Telaah/Surat Informasi Kesesuaian Tata Ruang.	1 dokumen	Meningkatnya pemahaman dan akses informasi penataan ruang Kota Yogyakarta.	14 kecamatan	278.337.830	306.171.613		
							Sosialisasi/	1						

No	Urusan/ Bidang urusan Pemerintah Daerah dan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penang- gung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
							Pembinaan Tata Ruang Kota Yogyakarta	dokumen						
							Kajian Pengembangan Kawasan Simpul Jaringan Transportasi/ Transit Oriented Development TOD)	1 dokumen						
							Kajian Potensi Pengembangan Kawasan Pedestrian Kota Yk.	1 dokumen						
							Kajian Fungsi Ruang pada Zona Perdagangan dan Jasa di Kota Yk.	1 dokumen						
6	Program Pengendalian Tata Ruang	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang.	Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat.		Persentase Penilaian Pelaksanaan , pengendalian dan pengawasan tata ruang.	56,50 %					1.006.296.940	1.106.926.634		
6.1	Pengendalian			Kota			Kajian Evaluasi	1	Tersedianya data	2	221.241.140	243.365.254		

No	Urusan/ Bidang urusan Pemerintah n Daerah dan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penang- gung Jawab		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur					Target	
	Tata Ruang			Yogyakarta			Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang.	1 dokumen	dokumen	rinci pemanfaatan ruang kota Yogyakarta dan kesesuaian terhadap perencanaan tata ruang daerah	dokumen				
6.2	Pengawasan Tata Ruang			Kota Yogyakarta			Laporan Penaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Pengawasan Tata Ruang (Turbinlakwas)	1 dokumen		Meningkatnya kesesuaian penyelenggaraan Penataan Ruang yang tertib dan berkelanjutan.	5 dokumen	304.422.400	334.864.640		
							Laporan Standar Pelaksanaan Minimal (SPM) Penataan Ruang.	1 dokumen							
							Laporan Penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Penataan Ruang.	1 dokumen							
							Neraca Penatagunaan Air. Penyusunan Kajian Perangkat Pengendalian Penataan Ruang	1 dokumen							
6.3	Pengelolaan Data dan			Kota Yogyakarta			Pengembangan dan Updating	1 dokumen		Terpenuhinya kebutuhan	3 dokumen	480.633.400	528.696.740		

No	Urusan/ Bidang urusan Pemerintah n Daerah dan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penang g Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
	Informasi Tata Ruang						Sistem Informasi Tata Ruang (SITARU)		informasi tata ruang.					
							Pengembangan dan Updating Sistem Informasi Pertanahan (SIPERTA)	1 dokumen						
							Pembuatan Peta Sebaran Bangunan Berbasis GIS.	1 dokumen						
							Pembuatan Profil Tata Ruang Kota.	1 dokumen						
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>									22.104.150.960	24.314.566.056			

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta tahun 2019 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Visi dan Misi Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029 serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui RKPD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2019.

Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitas pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2019 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2019, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Perangkat Daerah diharapkan akan lebih terakomodasi, terintegrasi dan bersinergi serta berkelanjutan dengan sesama Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.

Yogyakarta, 2018

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang  
Kota Yogyakarta

Ir. Hari Setyowacono, MT.  
NIP. 19640126 199303 1 005